

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI BATAVIA PADA MASA KOLONIALISME
TAHUN 1901-1942
M. Zaqi al-Z¹, Andi²

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. Hamka
Muhzaqi29@gmail.com, andi@uhamka.ac.id

Abstrak

Penelitian ini, ditulis untuk mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan pada masa kolonial di Batavia pada tahun 1901-1942. Metodo penelitian yang digunakan ialah metodologi historis dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini, ialah mengkaji perkembangan pendidikan yang di mana pada masa itu ialah masa etis dimana kebijakan tersebut berdampak pada berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, sampai kedalam ranah pendidikan. Dalam ranah pendidikan sendiri, pemerintah kolonial banyak melakukan gerakan pembangunan sekolah untuk rakyat pribumi dengan maksud untuk mencetak tenaga kerja yang murah. Dalam lingkungan rakyat Pribumi batavia sendiri mereka sudah mengenal pendidikan islam layaknya pesantren, dan majlis'taklim. Dan pada awal abad 20 tersebut munculah madrasah sekolah modern islam pertama yaitu Jamiatul khair muncul sebagai lawan dari pendidikan yang sudah disediakan oleh pemerintah kolonial.

Kata kunci: Pendidikan, Batavia, Politik etis, Jamiatul Khair

Abstract

This study was written to find out how the development of education during the colonial period in Batavia in 1901-1942. The research method used is a historical methodology using a literature study approach. The result of this study is to examine the development of education which at that time was an ethical period where the policy hadan impact on various fields such as economics, social, to the realm of education. In the realm of education itself, the colonial government carried out many movements to build schools for indigenous people with the intention of producing cheap labor. In the environment of the Indigenous people of Batavia themselves, they are familiar withIslamic education such as pesantren, and majlis' taklim. And at the beginning of the 20th century, the first modern Islamic school madrasa, namely Jamiatul Khair, emerged as an opponent of the education that had been provided by the colonial government.

Keywords: Studies, Batavia, Politik etis, Jamiatul Khair

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan lembaga yang sentral dalam proses pembangunan manusia sebagai penunjang kemajuan yang di mana bisa mengangkat kehidupan di masadepan. Pendidikan sebagai salah satu usaha manusia merupakan buah dari hasil tanam terbaik yang sudah dikembangkan oleh manusia sebagai kepentingan generasi muda untuk melanjutkan kehidupan esok hari (Utami, 2017). Pendidikan sendiri merupakan proses di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil dari interaksi seseorang dengan lingkungan fisik serta sosial. Pendidikan tersebut berlangsung sepanjang hayat hingga akhir individu tersebut (Affandi, 2016)

Belanda sebagai negara yang menduduki nusantara, awalnya hanyalah negara yang hanya mempunyai kepentingan berdagang di bumi nusantara. Namun seiring berjalan waktu, bukan hanya berdagang. Mereka juga memiliki misi penting untuk membawa ajaran Kristen serta ingin menguasai wilayah nusantara. Mereka memiliki motivasi yaitu “Tiga G” (*Gold, Glory, Gospel*) *Gold* sendiri berarti emas atau ekonomi, *Gospel* serta *Glory* berarti kejayaan yang bisa di simpulkan seperti politik atau kekuasaan. Kebenaran misi tersebut bisa di lihat dalam pernyataan pada hak octori VOC yang bertuliskan “ “Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama

Kristen dengan mendirikan sekolah”(Tirolian, 2016)

Mereka para rakyat belanda yang berpendidikan melihat negara Indonesia yang penuh hasil alam membuat mereka makin yakin dalam pelaksanaan Tiga G tersebut, di mana yang nantinya akan menduduki wilayah Indonesia. Sebagai negara yang belum merdeka dulu, masyarakat kita tidaklah kompeten terhadap pendidikan pada masa itu. Hanya mementingkan kebutuhan sangat pandang yang membuat masyarakat mudah di tipu daya oleh pendatang seperti belanda yang ke depannya dimanfaatkan dan terjadilah apa yang dinamakan kolonialisme oleh belanda terhadap rakyat Indonesia, di mana masyarakat masih belum merdeka baik dalam kehidupan, pendidikan, maupun negara.

Kolonialisme ialah suatu usaha untuk menduduki wilayah bangsa lain yang tujuannya ialah mengurassumber daya suatu bangsa yang diduduki atau dikuasai demi pengolahan industrialisasi di Negara Kolonisator (Zarkasyi, 2009) .Tetapi, kesejahteraan atau kelangsungan hidup baik dalam segi pendidikan, moral, dan agama tidak diperhatikan. Indonesia yang pada saat itu diduduki oleh belanda merupakan salah satu negara yang merasakan apa yang namanya kolonialisme.

Jakarta atau Batavia pada saat itu sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda merupakan salah satu yang berkembang pesat pada masanya, salah satu perkembangan di Batavia yaitu pendidikan. Pemerintah Belanda

sendiri dalam pelaksanaan pendidikan kaum asli Indonesia, ialah dengan mengadakan apa yang di namakan politik etis (*ethische politiek*), yang di mana merupakan salah satu upaya belanda menghargai atau balas budi terhadap pengorbanan rakyat Indonesia atas dilaksanakannya *cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa (MIZWAR, 2019).

Lembaga pendidikan pada masasaat itu, Saat berlangsungnya politik etis terbagi atas tiga strata. Strata pertama ialah strata paling atas yaitu sekolah untuk para anak-anak Belanda yaitu *Europeesche Lagere School* (Sekolah dasar), *Hogere Burgerschool* (sekolah menengah), dan seterusnya ke perguruan tinggi. Strata kedua merupakan untuk anak-anak pribumi Indonesia yang orang tuanya termasuk orang berekonomi dan memiliki kuasa dalam pemerintahan, yang di mana bisa di sandangkan sebagai kelompok Elit Indonesia. Anak-anak tersebut dimasukkan ke sekolah seperti *Hollandsch-Inlandsche School* (Sekolah dari belanda untuk pribumi) , *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (Sekolah menengah), *Algemeene Middelbare School* (pendidikan menengah untuk umum) hingga dilanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan di strata terbawah ialah anak-anak bumiputra, yaitu di mana masyarakat yang hanya menggenggam sekolah pendidikan desa (3 tahun) atau sekolah kelas dua (5 tahun).

Di Batavia sendiri, ada berbagai macam bentuk pendidikan. Dari yang disediakan oleh pemerintah belanda serta pendidikan yang di bentuk oleh

masyarakat . pendidikan yang di bentuk oleh masyarakat ada yang bersifat agamis seperti majlis taklim atau madrasah dan lainnya (terpisah dari pendidikan belanda). Sedangkan yang didirikan oleh pemerintahan hindia belanda yaitu sistempendidikan yang penerapannya menggunakan model pendidikan barat bagi anak-anak Eropa dan pendidikan pribumi yang diberikan untuk masyarakat pribumi dengan menggunakan metode pendidikan eropa(Nasution, 2011).

Penelitian ini, bertujuan melihat perkembangan pendidikan masa kolonialisme pada awal abad ke 20 yaitu 1901 hingga 1942. Dimanah pada permulaan abad ke 20 tersebut ada sebuah aturan politik dari kerajaan Belanda untuk membelas budi terhadap rakyat Indonesia salah satunya dalam bidang pendidikan. jika dilihat pribumi di Batavia yang nota Benya merupakan masyarakat Betawi yang sudah kental dengan budaya Islam seperti mengaji akan terjadi sebuah gesekan terhadap aturan atau gagasan dari politik etis yang dimana lebih mencondongkan kepada pendidikan barat yang kurang mementingkan segi pendidikan agama. Dari sini mau tidak mau akan ada perubahan baik pada sistem dan lembaga pendidikan yang ada pada masa itu, baik bagaimana pemerintahan kolonial memperluas gagasan politik etis mereka atau masyarakat pribumi Batavia yang tetap terhadap pendidikan Islam seperti madrasah atau pun pengajian-pengajian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan studi pustaka. Metode historis merupakan metode yang di mana mengkaji tentang peristiwa masa lampau yang terjadi atas segala hal di dunia, baik dalam ruang lingkup alam, dunia manusia, sedangkan dalam arti yang lebih kecil, sejarah hanya mencakup peristiwa masa lampau (Latief, 2006)

Sejarah sendiri adalah aktualisasi manusia pada masa lalu yang terjadi atas segala hal yang ada dunia, baik dalam ruang lingkup alam, dunia manusia, sedangkan dalam arti yang lebih kecil, sejarah hanya mencakup peristiwa manusia (Latief, 2006). Arti kata sejarah sendiri memiliki dua pengertian, yaitu sejarah sebagai peristiwa lalu sejarah sebagai hasil dari penelitian seseorang. Sejarah sebagai peristiwa menjabarkan semua soal yang pernah dirasakan, dibayangkan, dikatakan, dan telah dicitakan manusia yang saling berkaitan satu sama lain.

Sedangkan sejarah sebagai penelitian atau sejarah ilmiah dicapai setelah para sejarawan menghasilkan sebuah karya tulis yang memiliki beragam tema dari zaman ke zaman, yang dalam metodologi penelitian disebut Historiografi. Sejarah ilmiah ditulis dengan menempuh berbagai proses-proses intelektual, konstruktif, dan kritis (Miftahudin, 2020)

Metode penelitian sejarah sendiri terdiri menjadi 4 tahapan ; Tahapan pertama merupakan Heuristik, yaitu kegiatan di mana peneliti melakukan pelacakan sumber yang sifatnya masih belum di kelola. Kedua ialah kritik sumber, di mana peneliti melakukan pengecekan terhadap sumber-sumber

yang sudah di dapat serta dinilai keasliannya untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya, pada tahap kritik sumber terdapat dua jenis penilaian yaitu melalui kritik internal dan eksternal. Ketiga ialah Interpretasi (penafsiran), di sini peneliti melakukan analisa terhadap data dari berbagai sumber yang telahterkumpul. Terakhir masuk ke fase Historiografi yang di mana merupakan fase penulisan sejarah dengan sumber- sumber yang telah teruji kebenarannya(Zulaicha, 2014).

Lebih lanjut, peneliti akan membahas soal metodologi sejarah secara aplikatif sesuai dengan aturan penulisan yang sudah ada.

1. Heuristik (pengumpulan sumber)

Heuristik merupakan kegiatan mengumpulkan sumber yang nantinya diolah menjadi sumber penulisan sejarah. Sumber sejarah mempunyai jenis yang banyak, antara lain sumber tertulis, sumber lisan, sumber bendawi, sumber simbol, geospasial, toponimi dan lain sebagainya. Jika seorang peneliti dapat memperoleh macam-macam sumber itu, maka peluang untuk dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif dalam sejarah, akan terbuka lebar.

Penulis akan mengutamakan pencarian sumber tertulis. Langkah yang ditempuh adalah melakukan kunjungan ke perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan koleksi buku sejarah Batavia atau Jakarta. Beberapa perpustakaan yang dikunjungi antara lain perpustakaan kampus Universitas Buya Hamka, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Daerah Jakarta di Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Perpustakaan Nyi Ageng Serang dan Perpustakaan Museum

Fatahillah. Diharapkan dari penelusuran di berbagai tempat yang menyimpan koleksi buku sejarah Jakarta atau Batavia tersebut, dapat diperoleh sumber yang melimpah untuk digunakan sebagai bahan pembacaan atas sejarah pendidikan Batavia di era kolonial.

2. Kritik Sumber

Sumber-sumber yang sudah dikumpulkan kemudian diverifikasi dan dipilah untuk mendapatkan sumber pilihan. Dalam penelitian sejarah, tahap ini disebut dengan kritik sumber. Terdapat dua macam jenis kritik sumber, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Pembagian ini berasal dari penjelasan Louis Gottschalk tentang macam jenis alat verifikasi data sejarah (Abbas, 2014).

Kritik eksternal menasar pada pemeriksaan kondisi fisik data tertulis untuk menentukan apakah sumber tersebut otentik atau tidak. Suatu karya tulis yang dilahirkan pada suatu kurun, umumnya mempunyai karakteristik tertentu yang khas, seperti model penulisannya, tanda tangan, cap, cat air (Water mark) dan bagian lainnya. Dalam kajian sejarah, langkah ini penting untuk menguji kedudukan sumber tertulis yang diyakini sebagai sumber primer. Dalam penelitian ini, termasuk dalam dokumen primer adalah dokumen-dokumen Pemerintahan Hindia Belanda yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Batavia.

Di samping kritik eksternal, penulis juga akan melakukan kritik internal. Langkah ini digunakan untuk memeriksa keabsahan informasi yang terdapat dalam suatu sumber tertulis. Apabila didapati informasi tersebut berbeda jauh dengan informasi umum mengenai suatu keterangan sejarah, maka dokumen ini layak untuk

diragukan kebenarannya. Namun, apabila yang berbeda tidak sampai mengoreksi gambaran besar tentang suatu peristiwa atau kisah hidup seseorang, maka masih dapat dimengerti, itu pun masih harus menjalani pemeriksaan triangulasi data.

3. Hermeneutika

Data-data yang sudah dikumpul perlu untuk saling disinambungkan sesuai dengan bentuk narasi yang dibangun. Seyogyanya diketahui, antara satu data dengan data lain tidak mempunyai korelasi langsung yang menghubungkan keduanya. Di sini, penulis perlu melakukan analisa untuk mendialogkan data-data tersebut menjadi saling relevan dan bersifat saling mendukung antara satu data dengan data lainnya.

Hermeneutika sebenarnya adalah suatu istilah yang akrab dengan aktivitas penafsiran korpus (kitab suci) keagamaan. Dalam konteks penelitian ini, hermeneutika adalah kegiatan penafsiran data yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh suatu telaah, narasi serta penjelasan yang konstruktif dan solid. Dalam membuat satu paragraf contohnya, perlu diramu sejumlah informasi agar kalimat-kalimat di dalamnya saling support. Kalimat kedua, ketiga dan seterusnya akan mendukung kalimat pertama yang bertindak sebagai main idea.

Kegiatan hermeneutika akan terlihat salah satunya ketika menjadikan sumber bahasa Belanda sebagai sumber penelitian. Keterangan – keterangan dalam bahasa Belanda mungkin saja belum mampu menjelaskan arti yang relevan dengannya. Terdapat bahasa-bahasa asing yang artinya perlu dicari padanannya atau kata yang mendekati

terjemahan dalam bahasa Indonesia. Langkah ini bisa dimaknai sebagai kegiatan hermeneutika sederhana, yakni penafsiran atas hasil terjemahan teks berbahasa Belanda tersebut.

4. Historiografi

Historiografi adalah istilah yang merujuk pada kegiatan penulisan sejarah. Dalam hal ini, penulisan laporan ini adalah suatu bentuk dari historiografi. Historiografi pada penulisan ini dimulai setelah aturan – aturan penulisan penelitian ini terlaksana seperti yang sudah dibahas di atas. Ini merupakan tahap terakhir dari penulisan artikel ini karna Historiografi dalam penelitian sejarah merupakan proses di mana penulis sudah mengumpulkan, memverifikasi, dan memilah sumber-sumber yang tersedia.

Dalam kalangan peneliti sendiri, (Sjamsudin, 2007) Mengemukakan soal penulisan historiografi menjadi 6 tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu : 1) pemilihan topik yang tepat, 2) Memilih dan memilah eviden (sumber) yang relevan dengan topik yang dipilih, 3) Menulis catatan tentang berbagai hal yang di anggap penting juga relevan dengan topik penelitian, 4) Mengevaluasi berbagai sumber secara kritis semua sumber yang sudah di kumpulkan, 5) menyusun semua hasil dari sumber-sumber penelitian (catatan berupa fakta) ke dalam pola yang benardengan sistematika yang tercatat benar, 6) menyampaikan hasil penulisan secara menarik dan mengomunikasikan secara jelas agar mudah dimengerti oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Politik Etis terhadap Pendidikan pada Masa Kolonial.

Pendidikan di Indonesia sudah dimulai saat masa kependudukan VOC, yakni di mulai dengan pendirian sekolah untuk menghilangkan agama Katolik dengan penyebaran agama Protestan. Dalam masyarakat kita pun sudah ada yang terdidik atau berpendidikan seperti orang yang menempuh pendidikan Islam di pesantren atau langgar.

Setelah itu, pendidikan kita masuk pada Zaman Etis, di mana suasananya lebih progresif dengan semboyannya ialah kemajuan bagi masyarakat pribumi pribumi. Gerakan etis sendiri menjadi gambaran rakyat untuk lebih maju, salah satunya dalam bidang pendidikan. Saat itu, masyarakat pribumi masih sulit untuk mendapatkan akses pendidikan modern. Telah diketahui, bahwa pada masa itu sekolah dikelompokkan berdasarkan ras dan latar belakang sosial yang dimiliki, yang terbagi menjadi berbagai kelompok yaitu sekolah untuk Eropa, Arab, India, dan Cina serta yang terakhir ras pribumi (Muhammad Fakhriansyah & Intan Ranti Permatasari Patoni, 2019).

Setelah Politik Etis tersebut diberlakukan, muncullah sekolah-sekolah modern yang bisa diakses oleh warga pribumi. Pada permulaannya, di tahun 1903 mulailah didirikan sekolah rendah yang bernama *Volkschool* (Sekolah desa) dengan masa pembelajaran 3 tahun yang nantinya dilanjutkan dengan program *Vervolgschool* (Sekolah lanjutan) dengan masa pembelajaran sekitar 2 tahun. Sekolah seperti ini lalu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya, misalnya dinamakan *Meer Uitgebreid leger onderwijs* (MULO) yaitu sekolah yang jenjangnya sama dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda terdapat program

Algemeene Middelbare School (AMS) yang jenjangnya sama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Volkschool tersebut dijalankan berdasarkan inisiatif Gubernur Jendral Van Heutz. Dia berpendapat bahwa jenis sekolah ini ialah sekolah yang lebih sederhana dan lebih terjangkau harganya. Program belajarnya meliputi membaca, menulis dan berhitung dalam bahasa Jawa. Ada juga pembelajaran seperti keterampilan tangan seperti membuat keranjang, pot, genting, dan berbagai keterampilan tangan lainnya.

Lokasi belajarnya bersifat sementara, yaitu memakai ruang pendapa, ruang yang biasa digunakan untuk menerima tamu tuan rumah. Kayu bangunan ini diambil dari hutan yang ditebang untuk penanaman kopi. Para gurunya diambil oleh kalangan penduduk sendiri. Mereka dibayar dengan tanah yang nantinya bisa mereka garap dan menerima hasil dari tanah tersebut.

a. Munculnya dualisme pendidikan

Terdapat fenomena yang dinamakan dualisme pendidikan di abad XX. Istilah itu merujuk pada keadaan pengelolaan sekolah yang terbagi dalam dua bentuk. Pertama, sekolah yang didirikan dan diatur oleh pemerintah Hindia Belanda (Brugmans & Johannes, 1938). Kedua, sekolah yang bersifat mandiri dan tidak terikat dengan aturan pemerintah Hindia Belanda. Sekolah jenis pertama adalah lembaga pendidikan yang diperuntukkan untuk mencerdaskan pribumi dengan konsep pendidikan yang diatur pemerintah (Tirolian, 2016b). Sedangkan yang kedua, bentuk pendidikannya ditentukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Sekolah jenis kedua biasanya tidak mendapat

dana operasional atau dana bantuan dari pemerintah, seperti sekolah jenis pertama.

Kepemilikan sekolah jenis pertama ada di tangan pemerintah. Sekolah jenis kedua dimiliki secara pribadi. Termasuk para pemilik sekolah kedua ini adalah kalangan Kyai atau ulama yang mengajar di pesantren atau majlis taklim. Biasanya sang Kyai atau guru agama Islam mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan segala aspek dari sekolahnya (Kaars Sijpesteijn, 2012).

b. Pengaruh politik etis terhadap lembaga pendidikan

Politik Etis membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan lembaga pendidikan khas Nusantara, seperti sekolah-sekolah Islam yang lebih dikenal dengan sebutan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya menitikberatkan pada pendidikan budi dan agama Islam (E. ENSERING, 1987). Sebenarnya, tidak tepat jika melihat pesantren pada abad XIX sebagai lembaga pendidikan agama semata. Nyatanya, banyak ilmu serta keterampilan lain (vokasi) yang menjadi kurikulum pesantren sebagai bekal para pelajarnya (santrinya) ketika nanti mengabdikan di masyarakat, seperti keahlian berdagang, bertani, berkebun, kerajinan tangan dan lain sebagainya (Ryandono, 2018). Pemerintah Hindia Belanda menetapkan lembaga pendidikan Islam yang tidak ada dalam data kedinasannya sebagai sekolah liar atau *wilde scholen* (Untung, 2013).

Para Kyai dan guru agama dianggap oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai sosok yang gemar membuat kerusuhan sosial (Herman, 2013). Mereka yang pernah menunaikan ibadah haji ke Makkah, bahkan dianggap sebagai subyek yang

akan mengobarkan semangat perjuangan rakyat menentang kedudukan pemerintah kolonial (Istikomah, 2017). Kasus yang paling tepat untuk melihat peristiwa ini salah satunya terlihat dalam pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888 (Hamidah, 2010)

Pada masa itu Islam dan lembaga pendidikannya, merupakan ancaman bagi keberadaan pemerintahan kolonial Belanda. Ancaman ini mulai terlihat terutama pada kebijakan keamanan serta ketertiban (*rust en orde*) dan kelanjutan penjajahan kolonial belanda di tanah Hindia. Maka dari itu, Snouck Huurgronje berpendapat bahwa pendidikan Barat merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengikis dan menaklukkan pengaruh Islam di Indonesia. Maka dari itu, terbentuklah sekolah pasca Politik Etis tersebut seperti Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat yang memiliki ongkos studi yang murah dan juga kurikulum yang praktis, serta menjanjikan siswanya untuk mendapatkan pekerjaan meski hanya sebagai tenaga administrasi rendahan. Dari sinilah, terlihat adanya dualisme dalam pendidikan masyarakat pribumi, di mana pemerintahan Belanda lebih peduli terhadap lembaga pendidikan yang dibangunnya ketimbang berbagai lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara (Syarif, 2019).

Pemerintah Belanda sendiri sampai membuat beberapa aturan untuk mendukung kebijakannya tentang pendidikan Barat dengan mengadakan aturan Ordonansi Guru (Goeroe Ordonantie) pada Staatsblad 1905 No. 550 yang berisi kewajiban pada setiap penyelenggara pendidikan Islam untuk diwajibkan memperoleh izin tertulis yang diberikan bupati atau pejabat yang setara kedudukannya.

Setiap guru diharuskan membuat daftar murid secara lengkap dengan berbagai keterangan yang harus dikirimkan ke pejabat yang bersangkutan. Dari kasus petani Banten 1888 yang sudah disinggung sebelumnya, Ordonansi Guru ini merupakan rujukan atau jalan keluar bagi pemerintahan kolonial belanda untuk mengawasi pendidikan agama Islam, dikarenakan pada peristiwa tersebut kebanyakan ditangani atau ditukangi oleh para haji dan para guru agama (Dahlan, 2020).

Isi dari Ordonansi Guru tersebut ditujukan untuk mengatur keberlangsungan pengawasan Belanda terhadap pembelajaran agama Islam di tanah Jawa serta Madura, tidak termasuk Surakarta dan Yogyakarta. Substansi pada Staatsblad nomor 550 tahun 1905 berisi 6 pasal, ialah :

1. Guru-guru agama yang memiliki reputasi baik dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang akan mengajar pelajaran agama Islam, wajib memiliki izintertulis dari Bupati atau seorang Patih
2. Para guru agama wajib mendaftarkan muridnya secara tertulis dengan ketentuan yang berlaku (*Blanko*). Pendaftaran yang sudah ditetapkan Bupati ialah ; para murid yang datang dari luar daerah atau kediamanguru agama, harus ditetapkan Bupati dengan menyerahkan identitas siswa yang bersangkutan.
3. Guru agama diawasi saat mengajar oleh Patih atau Bupati; Kepada Patih dan Bupati, guru agama wajib menyerahkan daftar mata pelajaran yang sudah

diajarkan, dan memberi izin masuk ke keduanya (Patih dan Bupati) ke berbagai tempat pengajaran dan tempat tinggal murid.

4. Guru agama yang tidak memiliki izin saat mengajar atau lalai saat memenuhi syarat yang sudah ditentukan akan mendapat denda maksimal 25 gulden, atau diberi sanksi kurungan maksimal hari dengan bekerja untuk Negara tanpa upah; Bagi guru agama yang mengajar bertentangan dengan aturan yang berlaku, atau menggunakan nama palsu saat menerima murid, mendapatkan denda maksimal 100 gulden, atau sanksi kurungan dengan maksimal 30 hari bekerja kepada Negara tanpa upah.
5. Guru agama harus tunduk pada peraturan. Pasal 6 peraturan tersebut diberlakukan di wilayah Jawa dan Madura, kecuali wilayah Yogyakarta dan Surakarta yang diduduki Kesultanan.
6. Peraturan tersebut diberlakukan di wilayah Jawa dan Madura, kecuali wilayah Yogyakarta dan Surakarta yang diduduki Kesultanan (Setiawan, 2014).

Di samping lembaga pendidikan yang bercorak tradisional seperti pesantren, di Hindia Belanda juga terdapat lembaga pendidikan Islam yang mengadopsi kurikulum modern (Fuad Raya, 2018). Umumnya, lembaga pendidikan ini berdiri di kota-kota besar Nusantara, dikarenakan murid-murid yang bersekolah di sini adalah para anak pegawai pemerintahan pribumi dan orang kaya setempat (van Ufford, 1885). Di Batavia, terdapat

beberapa lembaga pendidikan Islam modern, seperti Jamiat Khair.

Profil yayasan jamiatul khair.

Jamiat Khair merupakan yayasan yang dibentuk oleh orang-orang keturunan Arab pada tahun 1901, dan sebagai sebuah organisasi dan pada tahun 1905. Organisasi ini mendapat izin sebagai organisasi di Hindia Belanda dengan berpacu pada besluit No. 4. Pendirinya merupakan kalangan keluarga dari Bin Shahab dan Bin Yahya. Jamiat Khair sendiri ialah organisasi sosial modern yang dikelola oleh orang arab yang berpendidikan modern. Seiring berjalannya waktu, kalangan pribumi juga ikut serta dalam organisasi tersebut. Salah satu tokoh pribumi yang ikut serta dalam Jamiatul Khair ini ialah KH. Ahmad Dahlan yang juga dikenal sebagai pendiri dari organisasi Islam bernama Muhammadiyah (Sihab, 1998). Kelahiran organisasi tersebut didorong dengan faktor banyaknya jumlah orang-orang arab di Indonesia yang didukung dengan perbaikan transportasi dan terbukanya Terusan Suez (Rijal, 2017).

Jamiatul Khair resmi berdiri pada tanggal 17 Juni 1905, yang disahkan langsung oleh Gubernur Jendral Hindia belanda dan juga anggaran dasarnya telah mendapatkan persetujuan. Tujuan awal Jamiatul Khair yang terdapat pada anggaran dasarnya tertulis tanggal 15 Agustus 1903 ialah untuk memberikan bantuan untuk orang arab, baik pria atau wanita yang hidup di wilayah Batavia dan sekitarnya bila ada anggota keluarga mereka meninggal atau mengadakan syukuran perkawinan, tidak lebih dari itu.

Setelah mendapat pengakuan oleh pemerintah Hindia belanda dan

memiliki badan hukum, maka sesuai aturan pada pasal 10 Anggaran dasar tanggal 15 Agustus 1903, selanjutnya diadakanlah rapat umum bagi anggota untuk pemilihan ketua jamiatul khair yang baru yaitu Idrus Bin Abdullah al-Masyhur, dan wakil ketuanya Salim bin Awad Balweel, sekretarisnya ialah Muhammad al-Fakhir bin Abdurrahman al-Masyhur, dan Bendahara Idrus bin Ahmad Syahab.

Dampak dari berdirinya Jamiatul Khair bagi masyarakat nusantara dan pemerintah kolonial.

Madrasah Jamiatul Khair yang waktu itu di ketuai oleh Ali Abubakar Shahab mulai dikenal di seluruh wilayah bumi nusantara, sehingga murid-muridnya berasal dari berbagai penjuru yang bukan hanya datang dari wilayah Batavia. Biasanya ketika para murid-murid yang menimba pendidikan di Jamiatul Khair sudah selesai, mereka akan kembali ke wilayahnya masing-masing untuk menjadi guru dan membuat madrasah. Murid-murid jamiatul khair sendiri kebanyakan berasal dari wilayah Cilegon, Serang, Purwakarta, Bogor, Cirebon, Bangka, Palembang, Belitung, hingga Manado.

Banyaknya jumlah murid yang menimba ilmu di Jamiatul Khair bukan hanya karna namanya yang terkenal, tetapi karna tenaga pengajarnya yang profesional yang di datangkan langsung dari wilayah timur tengah untuk menyebarkan semangat pan islamis kepada para murid madrasah di jamiatul khair. Beberapa nama pengajar di Jamiatul Khair yaitu Sayyid Jamaludin Al-Afghani, Syekh Mohammad Abduh, dan Sayyid Rashid Ridha. Sedangkan tenaga pengajar dari timur tengah yaitu Ustaz Muhammad Syekh Sorkati dari Sudan (1911), yang kemudian

mendirikan organisasi Al-Irsyad pada 1914. Kemudian ustaz Muhammad Thayib Al-Maghribi dari Maroko, Ustaz Muhammad Noor Abdul Hamiddari mekah dan Ustaz Mohammad Abdul Fadl Al Anshari dari sudah pada 1913.

Berdirinya Jamiatul Khair ternyata tidak membuat belanda cukup senang, mereka tetap menganggap madrasah Jamiatul Khair sebagai sebuah ancaman dan akan membahayakan perpolitikan kolonial. Maka dari itu pemerintah belanda mulai melancarkan pengawasan yang ketat terhadap gerakan-gerakan Islam dan menyisipkan ajaran anti-Islam di sekolah modern pemerintah Hindia Belanda.

Meski pemerintah belanda melakukan pengawasan yang ketat terhadap Madrasah jamiatul Khair dan menyebarkan ajaran anti Islam di berbagai sekolah modern mereka. Jamiatul Khair tetap menyebarkan semangat Pan Islamisme Sayid Djamaluddin Al Afghani, Syekh Mohammad Abduh dan Sayid Rashid Ridha. Jamiatul Khair sendiri juga sudah cukup banyak melahirkan Tokoh-tokoh nasional yang merupakan para penggerak pembaharuan agama Islam diantara-nya ialah K.H Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta, HOS Tjokroaminoto pendiri Syarikat Islam, H Samanhudi tokoh dari Sarekat dagang Islam dan H. Agus salim serta masih banyak tokoh nasional lain yang memiliki hubungan dengan yayasan Jamiatul Khair (Nurhasan, 2015)

Pendidikan Masyarakat Betawi di Batavia pada Masa Kolonial

Sebagai etnis yang sudah lama menduduki wilayah Batavia, masyarakat betawi merupakan etnis

yang memiliki sejarah panjang. Kehadirannya sebagai suatu etnis, lahir dari pada kesadaran bersama untuk menegaskan identitasnya yang berbeda dari pada etnis lainnya. Persoalan tersebut terlihat wajar karna pembentukan suatu etnis biasanya di pengaruhi oleh keadaan geografis, adat istiadat atau kelahiran sejarahnya yang unik. Faktor pendukung lainnya juga bisa mencakup pada bidang politik, , budaya, sosial dan agama.

Masyarakat betawi sendiri sudah mengenal pendidikan yang di mana dipercaya untuk menempatkan anak-anak mereka untuk mendalami ilmu- ilmu yang ada, salah satu ilmu yang penting bagi masyarakat betawi ialah ilmu-ilmu Islam. Maka dari itu para orang tua mempercayai anak-anak nya untuk di tempatkan pada lembaga pendidikan Islam.

Tiga jenis lembaga tersebut seperti pesantren, madrasah, dan majelis taklim. Dari ketiga jenis lembaga tersebut, pesantren merupakan salah satu lembaga yang paling tua pada lingkungan masyarakat Betawi jika di bandingkan yang lainnya. Yakni sejak abad ke-14 dengan berdirinya pondok pesantren Syekh Quro yang berada di Karawang (Rahmah, 2018)

Dalam ruang lingkung majelis taklim, masyarakat betawi banyak yang belajar di langgar-langgar atau pada rumah para pendatang yang berasal dari hadramaut. Mereka yang datang dari hadramani membuat kelompok yang banyak berisi para sayid atau juga bisa di sebut para Allawiyin di mana mereka di anggap sebagai keturunan nabi (ahlul bait) dengan otoritas keagamaan yang kuat. Para orang-orang hadramani tersebut lantas banyak bersosialisasi di Batavia dengan penduduk pribumi yaitu etnis betawi. Para orang tua anak-anak betawi tersebut banyak

yang menitipkan anak mereka untuk di ajarkan soal ilmu-ilmu islam. Dengan metode pembelajaran yang bersifat tradisional dan dengan dasar pemahaman juga penerjemahan tradisi keagamaan pada saat nabi secara tekstual, seperti pembelajaran Al- Quran, Hadist, Hukum pokok Islam, pembacaan maulid, dan ratib (wirid rutin) serta pengetahuan soal sejarah kenabian juga para sahabat. Semuanya mudah di mengerti oleh masyarakat betawi pada saat itu (Athoillah, 2019)

Pada masa sebelum kemerdekaan, Pesantren di lingkungan masyarakat betawi kebanyakan pesantren bermodel salafiyah (pondok pesantren yang mengkaji kitab kuning) (Indra & Hasbi, 2018). Salah satu pendidikan pesantren yang terkenal ialah pondok pesantren yang dibangun oleh Guru Marzuki Cipinang muara. Selain pesantren ada juga lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat betawi seperti madrasah. Madrasah di Indonesia sendiri merupakan sebuah lembaga lebih lanjut atau pembaharuan dari pada pendidikan tradisional seperti pesantren.

Dalam lingkungan seperti majelis taklim, di Batavia ada majelis taklim yang sudah ada sejak akhir abad ke-19, yaitu majelis taklim kwitang. Pendirinya merupakan Habib ali bin Abdurrahman Alhabsyi atau masyarakat betawi juga memamangilnya Habib ali Kwitang. Pola pengajaran di majelis taklim tersebut ialah menggunakan metode pengajaran kitab kuning juga ceramah yang diisi oleh para kyai yang di datangkan dari luar (Jayadi, 2008).

Majelis taklim sendiri merupakan lembaga pendidikan formal yang basisnya ada pada masjid dan musholla. Majelis taklim

yang di bentuk oleh Habib ali merupakan majlis taklim pertama di Batavia atau bagi rakyat betawi yang terbentuk pada tahun 1870 tanggal 12 April.

Terhusus di tanah betawi, madrasah yang berdiri pertama kali di wilayah tersebut ialah madrasah Jamiatul Khair yang berada di tanah abang pada tahun 1905 dan didirikan oleh Ali dan Idrus yang berasal dari keluarga Shahab. Lalu disusul dengan pendirian madrasah Unwanul Falah Kwitang yang berdiri pada 1938 didirikan oleh Habib Al-Habsyi Kwitang. Madrasah tersebut melahirkan berbagai tokoh seperti K.H. Abdullah Syafi'i, K.H. Tohir Rohili, K.H. Syafi'i Hadzami, K.H. Zayadi Mujahadjir, dan bayak lagi (Rahmah, 2018)

Lalu di susul oleh madrasah Unwanul Falah di kwitang, yang didirikan oleh Habib ali Al-Habsyi atau Habib ali kwitang pada tahun 1911. Murid-murid yang mendapatkan pendidikan di madrasah ini kemudian banyak yang menjadi ulama terkemuka di Betawi seperti K.H. Abdullah Syafii, K.H. Thohir Rahli, K.H. Jayaadi Muhadjir, K.H. Hajiismail Pendurenan, K.H. Muhammad Naim Cipete, K.H. Fathullah Harun dan Mu'allim K.H. M. Syafi'i, Cepete, K.H. Muhammad Naim, K.H. Syafi'i Hadzami. Di lanjutkan berdirinya Madrasah al-Ihsaniyah, di Salemba Tagelan, yang salah satu muridnya adalah K.H. Fathullah Harun (Fazlurrachman, 2020).

KESIMPULAN

Pendidikan sebagai usaha mencerdaskan dan memanusiakan manusia dengan upaya melalui pembelajaran serta pengajaran. Pendidikan pada masa kolonial menjadi

berkembang berkat adanya gagasan-gagasan sosial para liberalis kaum belanda yang menyuarakan soal balas budi dan pengurangan penderitaan orang-orang jawa. Belanda sebagai negara yang menduduki wilayah tanah nusantara di tuntut oleh para liberalis salah satunya ialah Piet Brooshoft seorang redaktur surat kabar De Locomotief. Bukan hanya Brooshoft, T Van deventer yang menyuarakan soal balas budi dalam artikel yang judulnya "Een Eereschuld" (Hutang budi) pada jurnal De Gids.

Lalu gagasan-gagasan tersebut di dukung oleh pidato ratu belanda pada 1901 saat pidato ratu di hadapan para parlemen muncul lah apa yang dinamakan politik etis. Politik etis merupakan sebuah politik balas budi, yang diterapkan di nusantara sebagai timbal balik kepada para pribumi. Dengan adanya politik etis berbagai bidang bisa berkembang seperti pendidikan meski tidak keseluruhan tujuannya untuk memajukan masyarakat pribumi.

Dari adanya politik etis tersebut perkembangan pendidikan masuk kepada tahap etis di mana masyarakat sudah banyak menerima pendidikan baik dari pemerintahan atau pun bukan, di karenakan sudah adanya pendidikan di tanah Batavia sebelum dan sesudah Politik etis tersebut terlaksanakan. Maka dari itu politik etis tidak hanya memberikan perkembangan terhadap pendidikan, tetapi juga menyadarkan penduduk tentang pentingnya pendidikan karna mulai banyaknya lembaga-lembaga sekolah yang bermunculan.

Di tanah batavia sendiri, sudah ada pendidikan tradisional dan modern yang hidup diluar campur tangan pemerintahan Hindia Belanda seperti pesantren, majlis taklim, dan madrasah. Untuk yang modern sendiri yaitu madrasah ada yang namanya Jamiatul Kheir, lembaga ini merupakan lembaga sosial yang berkembang menjadi lembaga pendidikan di Batavia untuk menaikkan kecerdasan masyarakat juga menerapkan pan islamisme di bumi Batavia. Pengajar nya sendiri

banyak yang berasal dari negeri timur dan para alumninya banyak yang menjadi tokoh nasional seperti K.H Ahmah Dahlan pendiri dari organisasi Muhammadiyah dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang menjadi ujung corong para pembangkit nasional. Lembaga ini banyak berperan dalam kehidupan pribumi nusantara salah satunya etnis betawi yang merupakan penduduk asli di batavia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I. (2014). Memahami Metodologi Sejarah Antara Teori dan Praktek *). *Jurnal ETNOHISTORI*, 1(1), 23–41.
<http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/848669>
- Affandi, A. (2016). *Dasar-dasar pendidikan* (Muslihudin (ed.)). CV. Elsi Pro.
- Athoillah, A. (2019). Pembentukan Identitas Sosial Komunitas Hadhrami di Batavia Abad XVIII-XX. *Lembaran Sejarah*, 14(2), 150.
<https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.45437>
- Brugmans, & Johannes, I. (1938). *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië*. JB Wolters.
- Dahlan, Z. (2020). RESPONS MUHAMMADIYAH DI INDONESIA TERHADAP ORDONANSI GURU AWAL ABAD XX. *Journal of Islamic Social Sciences*, 1(1), 26–48.
- E. ENSERING. (1987). DETRADITIONELE EN HEDENDAAGSE ROL VANLOKALE RELIGIEUZE LEIDERSIN DE PREANGER, WEST-JAVA. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde Is Focused in Particular on the Linguistics, Anthropology, and History of Southeast Asia, and More Specifically of Indonesia.*, 267–292.
https://www.jstor.org/stable/27863840?seq=1#metadata_info_tab_contents
- Fazlurrachman. (2020). *Peran dan Ketokohan KH Abdullah Syafii dalam Dakwah dan Pendidikan Islam 1910/1985*. UIN SMH BANTEN.
- Fuad Raya, K. (2018). SEJARAH ORIENTASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (DARIMASA KOLONIAL HINGGA ORDE BARU). *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2, 2581–0065.
<http://www.ejournal.iaindalwa.ac.id/index.php/jpi/article/view/202>
- Hamidah. (2010). GERAKAN PETANI BANTEN: STUDI TENTANG KONFIGURASI SUFISME AWAL ABAD XIX. *Studi Keislaman*, 14.2, 323–240.
- Herman, D. (2013). SEJARAH PESANTREN DI INDONESIA. *Renika Cipta*, 6(2), 145–158.
- Istikomah. (2017). Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 Dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda. *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 5.2.
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/2105/1360>
- Jayadi. (2008). *Pemikiran Dan Aktifitas Dakwah Habib Abdul Rahman Al-Habsyi Di Islamic*. Universtias Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta.
- Kaars Sijpesteijn, J. H. (2012). *Groei en stagnatie van het confessioneel onderwijs in*

- Nederlands-Indië 1848-1940*.
Latief, J. Abdul. (2006). *Manusia filsafat dan sejarah* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Miftahudin. (2020). *Metodologi penelitian sejarah lokal*. UNY Press.
- Mizwar, D. (2019). Dampak Kebijakan Politik Ethis Terhadap Perkembangan Pendidikan Rakyat Palembang Tahun 1900-1942 (Sebagai Sumbangan Materi Sejarah Di Sma Negeri 2 Palembang) [Universitas MUHAMMADIYAH PALEMBANG]. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Muhammad Fakhriansyah, & Intan Ranti Permatasari Patoni. (2019). Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 122–147. <https://doi.org/10.21009/jps.082.03>
- Nurhasan, H. (2015). *Orang arab betawi di jaman kolonial belanda abad ke- 19*.
- Rahmah, N. (2018). Khazanah Intelektual Ulama Betawi Abad ke-19 dan ke- 20 M. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(2), 195–226. <https://doi.org/10.31291/jlk.v16i2.564>
- Rijal, S. (2017). Internal dynamics within hadhrami arabs in Indonesia: From social hierarchy to Islamic doctrine. *Journal of Indonesian Islam*, 11(1), 1–28. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.1.1-28>
- Ryandono, M. N. H. (2018). Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20. *Mozaik Humaniora*, 18(2), 189–204.
- Setiawan, F. (2014). Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.3.1>. 47-70
- Sihab, Alwi. (1998). *Membendung arus :respons gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia*. Mizan digital publishing. <https://catalogue.nla.gov.au/Record/1431848>
- Sjamsudin, H. (2007). *Metodologi sejarah* (1st ed.). Penerbit pmbak.
- Syarif, M. (2019). POLITIK ETIS PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PESANTREN. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 5(1), 109–131.
- Tirolian. (2016a). Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan Islam di Indonesia. *State Islamic University of North Sumatra*, 264–275.
- Tirolian. (2016b). Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan Islam di Indonesia. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arabhya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 2.2, 264–275.
- Untung, S. (2013). Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren. *Edukasia Islamika*, 11(1). <https://www.neliti.com/publications/89841/kebijakan-penguasa-kolonial-belanda-terhadap-pendidikan-pesantren>
- Utami, P. N. (2017). Konsep Pendidikan Karakter Menurut KH. Hajar Dewantara. *Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, IAIN SALATIGA*, 1–95.

- van Ufford, J. (1885). Geschriften over Nieuw-Guinea, inzonderheid: Kolonel Haga, Nederlandsch Nieuw-Guinea en de papoesche eilanden, en W. F. versteeg, Nieuw-Guinea, in 't bijzonder Onin en Howiai. — Cd. Busken Huet, Het land van Rembrand. Studien over de Noord-Nederlandsche B. *De Economist*, 34.2, 723–742. https://link.springer.com/article/10.1007%2F0228178#auth-J_K_W_-Quarles_van_Ufford
- Zarkasyi, H. F. (2009). Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis. *Tsaqafah*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i1>.